

BAB II TINJAUAN TEORI

2.1 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Unit pelaksana teknis dinas atau badan daerah menggunakan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang selanjutnya disebut sebagai BLUD, untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Sistem ini memungkinkan pengelolaan keuangan yang fleksibel, yang menghindari ketentuan umum pengelolaan daerah. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 61/2007, BLUD juga memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui penjualan barang dan jasa tanpa mengutamakan keuntungan. RSUD adalah salah satu unit pelaksana teknis dinas yang harus berbentuk BLUD. Karena RSUD adalah pusat pelayanan kesehatan masyarakat, peningkatan pelayanan dan pengolaannya harus menjadi perhatian khusus. Penetapan tujuan BLUD menjadi penting karena:

1. Layanan umum secara lebih efisien, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan prinsip keadilan, kepatutan, dan manfaat sejalan dengan praktik bisnis yang sehat.
2. BLUD dirancang untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah, dengan status hukum tidak terpisah dari pemerintah daerah.
3. BLUD memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya saat melaksanakan tujuan tersebut, dan
4. BLUD dikelola sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah.

2.1.1 Definisi BLUD

Jelasnya, salah satu rencana perubahan di bidang keuangan negara adalah dari perencanaan anggaran tradisional menjadi perencanaan berbasis kinerja.

Dengan pendekatan berbasis kinerja ini, arah tujuan cadangan pemerintah pada umumnya tidak terletak pada input melainkan pada hasil. Pendekatan penganggaran berbasis kinerja sangat penting bagi satuan kerja pemerintah daerah yang memberikan jenis bantuan kepada masyarakat luas oleh wirausaha untuk kepentingan umum sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Uang Negara.

Selain itu, dengan adanya pasal 68 dan pasal 69 Peraturan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaraan Negara, maka instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberikan bantuan kepada masyarakat dapat melaksanakan desain administrasi moneter yang adaptif dengan mengutamakan efisiensi, produktivitas dan kecukupan. Sebagai pengembangan dari pedoman di atas, maka Menteri Dalam Negeri telah memberikan Pedoman peraturan menteri dalam negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Aturan pengelolaan keuangan pada badan layanan umum yang menjadi pola pengelolaan keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Bagi Satuan Kerja Daerah atau Satuan Kerja pada Satuan Kerja Wilayah di lingkungan Pemerintah Provinsi yang hendak melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) harus memenuhi persyaratan yang cukup khusus dan bersifat manajerial.

2.1.2 Persyaratan BLUD

Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 menetapkan persyaratan substantif, teknis, dan administratif untuk peningkatan status BLUD. Persyaratan substantif BLUD harus dipenuhi sehingga nilai yang diperoleh memenuhi kriteria status BLUD penuh atau minimal nilai 80. Tugas dan fungsi SKPD atau unit kerja

harus operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semi-barang atau jasa publik (*quasipublic goods*).

1. Berdasarkan rekomendasi sekretaris daerah untuk SKPD atau kepala SKPD untuk unit kerja, kinerja pelayanan dibidang tugas dan fungsinya layak dikelola dan pencapaiannya ditingkatkan melalui BLUD.
2. Kinerja keuangan SKPD atau unit kerja yang sehat, yang ditunjukkan oleh tingkat kemampuan pendapatan layanan yang cenderung meningkat dan efisien dalam membiayai pengeluaran, dan memiliki spesifikasi teknis yang terkait langsung dengan layanan umum kepada masyarakat. Kriteria layak kelola antara lain memiliki potensi untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan secara efektif, efisien, dan produktif. Apabila dokumen yang dibuat dan dikirim oleh puskesmas, yang mencakup:
 - a. Pernyataan komitmen untuk meningkatkan kinerja layanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat.
 - b. Struktur pengaturan
 - c. Rencana bisnis strategis (RBS)
 - d. Standar minimum pelayanan (SMP)
 - e. Laporan keuangan utama
 - f. Laporan pemeriksaan terakhir atau deklarasi kesediaan untuk diaudit secara independen.

Kepala daerah membentuk dan menetapkan tim penilai untuk menilai usulan penerapan, peningkatan, penurunan, dan pencabutan status PPK-BLUD.

2.2 Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah catatan dari suatu periode akuntansi yang digunakan untuk kinerja usaha tertentu. Dengan adanya laporan keuangan, suatu usaha dapat dinilai perkembangannya. Pelaporan keuangan harus diberikan informasi tentang teknis pengelolaan perusahaan dan melaksanakan tanggung jawabnya kepada pihak tertentu yang memegang kewenangan pemeriksaan laporan keuangan, atau pemilik perusahaan dan pemegang saham mengenai pemakaian pemakaian ekonomi. Afiliasi Akuntansi Indonesia (2015) menyatakan pentingnya laporan. Laporan keuangan merupakan suatu konstruksi yang menyajikan tempat terjadinya pelaksanaan moneter dalam suatu unsur. Kegunaan universal dari laporan moneter ini untuk premi publik adalah untuk memperkenalkan data sehubungan dengan posisi moneter, pelaksanaan moneter dan pendapatan suatu zat yang sangat berharga untuk mengejar pilihan keuangan bagi kliennya.

Dalam periode akuntansi tertentu, laporan keuangan berisi informasi tentang keuangan dan kinerja perusahaan yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerjanya. Menurut Munawir (2010:5), laporan keuangan biasanya terdiri dari neraca, perhitungan laba-rugi, dan laporan perubahan ekuitas. Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam jangka waktu tertentu. Maksudnya, kondisi perusahaan terkini adalah kondisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu (untuk neraca) dan jangka waktu tertentu (untuk laporan laba rugi).

Laporan keuangan merupakan hasil kegiatan pembukuan yang biasanya digunakan sebagai penghubung antara informasi keuangan dengan kegiatan bisnis organisasi dan dilibatkan oleh seluruh mitra dalam memanfaatkan informasi dan kegiatan keuangan di dalam organisasi. Pernyataan gaji mencerminkan hasil dan biaya yang telah digunakan untuk tugas-tugas organisasi (Kurniawan 2021). Perusahaan selama periode waktu tertentu, dan laporan perubahan ekuitas pemegang saham mengungkapkan alasan perubahan struktur modal perusahaan. Laporan keuangan dapat dianggap sebagai hasil dari sistem pembukuan sebagai laporan akuntansi, artikulasi keuntungan dan kerugian, dan pengumuman perubahan nilai investor, dan wajib karena digunakan untuk melaporkan kegiatan organisasi kepada orang-orang yang terlibat erat. Menurut Sanjaya (2018), 277-293, hal ini dapat menjadi tolak ukur keputusan pengguna.

Menurut Hanafi (2003:69), laporan keuangan merupakan informasi yang dapat dipakai untuk pengambilan keputusan, mulai dari investor atau calon investor sampai dengan manajemen perusahaan itu sendiri. Laporan keuangan akan memberikan informasi mengenai profitabilitas, risiko, *timing* aliran kas, yang kesemuanya akan mempengaruhi harapan pihak-pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan salah satu informasi yang penting bagi perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data-data.

2.2.1 Jenis Jenis Laporan Keuangan

Laporan laba rugi dan neraca adalah dua bentuk laporan keuangan utama yang dibuat oleh suatu perusahaan (Warsono 2001:25).

1. Neraca

Neraca, menurut Warsono (2001: 25), adalah laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan selama periode tertentu. Neraca ini dibuat berdasarkan persamaan dasar akuntansi, yaitu bahwa aktiva (aset) sama dengan kewajiban (liabilities) dan modal saham (modal saham).

2. Laporan laba-rugi

Laporan laba-rugi, menurut Warsono (2001:26), adalah laporan keuangan yang menunjukkan hasil usaha selama periode waktu tertentu. Laba rugi bersih adalah perbedaan antara pendapatan total dan biaya total. Pendapatan dihitung dengan mengurangi utang dari penjualan barang atau jasa.

3. Laporan Arus Kas

Adalah arus kas tahunan perusahaan yang dihitung dengan mengurangi laba bersih sebelum pos depresiasi. Pajak ditangguhkan merupakan perubahan bukan kas pada aset saat ini dan hutang.

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (IKatan Akuntan Indonesia 2002:4) Laporan keuangan dibuat dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang berkaitan kondisi keuangan, kinerja, serta perubahan kondisi keuangan

dan dapat dimanfaatkan bagi penggunaannya sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. laporan keuangan sangat diperlukan untuk mengukur hasil usaha dan perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu dan untuk mengetahui sudah sejauh mana perusahaan mencapai tujuannya. Laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. Sehingga laporan keuangan memegang peranan yang luas dan mempunyai suatu posisi yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan (Fahmi 2012:23).

2.2.3 Karakteristik Laporan Keuangan

Secara umum, laporan keuangan bisnis dagang, jasa, dan manufaktur terdiri dari empat bagian: laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Laporan keuangan, bagaimanapun, tidak hanya dibuat begitu saja; mereka memiliki ciri-ciri kualitatif yang melekat pada informasi akuntansi yang diberikan. Laporan keuangan yang dibuat menurut PSAK dan para ahli harus memenuhi karakteristik dasar berikut:

1. Karakteristik Laporan Keuangan Harus Relevan

Laporan keuangan yang relevan harus mengandung informasi yang dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka memeriksa peristiwa masa lalu atau sekarang dan memprediksi masa depan.

2. Karakteristik Laporan Keuangan Haruslah Andal

Laporan keuangan harus disajikan secara jujur dan dapat diandalkan agar informasinya dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Selain itu, laporan keuangan harus disajikan secara menyeluruh dan berdasarkan peraturan atau pedoman yang berlaku.

3. Dapat Dibandingkan

Untuk dapat dibandingkan dengan perusahaan lain maka sistem, pedoman, dan kebijakan prinsip dasar akuntansi yang digunakan harus sama. Selain membandingkan dengan perusahaan lain, laporan keuangan juga dapat dibandingkan antar tahun. Untuk membandingkan antar tahun, maka penyajian laporan keuangan perusahaan minimal harus disajikan dalam dua periode.

4. Dapat Dipahami

Salah satu kualitas penting dari laporan keuangan adalah informasinya yang mudah dipahami secara instan oleh pengguna, yang dianggap memiliki pemahaman yang cukup tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta keinginan untuk mempelajari lebih lanjut. Namun demikian, informasi yang rumit dalam laporan keuangan harus tetap ada.

2.2.4 Fungsi Laporan Keuangan

Laporan keuangan, yang dibuat dan didistribusikan kepada semua orang yang berkepentingan dengan operasi suatu perusahaan, pada dasarnya adalah alat komunikasi. Dengan kata lain, laporan keuangan berfungsi sebagai

alat untuk menyampaikan informasi keuangan dan aktivitas suatu perusahaan kepada semua orang yang berkepentingan dengannya. Dalam bukunya "Analisis Laporan Keuangan" (2001:11), Hernanto menyatakan bahwa manajemen dapat mendapatkan informasi yang diperlukan untuk:

1. Merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang dianggap penting.
2. Mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan atau aktivitas di dalam suatu kegiatan.
3. Menyusun rencana dan mengawasi pelaksanaan kegiatan atau aktivitas sehari-hari dalam perusahaan.
4. Memeriksa aspek-aspek dan tahap-tahap dari kegiatan tertentu dalam perusahaan.
5. Menilai kondisi atau posisi keuangan serta hasil usaha perusahaan.

Selain fungsinya yang disebutkan di atas, laporan keuangan juga berfungsi sebagai alat untuk membuat manajemen bertanggung jawab kepada semua orang yang menanamkan dana dalam perusahaan, terutama para pemilik.

2.2.5 Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Analisis laporan keuangan berarti: "menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun non kuantitatif dengan tujuan untuk

mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat." (Harahap, 1998).

Analisis laporan keuangan pada dasarnya merupakan analisis yang dilakukan terhadap berbagai macam informasi yang tersaji dalam laporan keuangan. Perbedaan analisis laporan keuangan bisnis dan sektor publik terletak pada objeknya.

Penggunaan analisis rasio keuangan pada sektor publik belum begitu banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, analisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan Pemda perlu dilaksanakan, meskipun kaidah akuntansi dalam laporan keuangan Pemda berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki organisasi privat. (Abdul Halim, 2007 : 231).

2.2.6 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Silalahi (2012), "kinerja juga dapat didefinisikan sebagai keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai dengan penggunaan anggaran dalam kuantitas dan kualitas yang diukur. Sebaliknya, Bastian (2006:274) Kinerja didefinisikan sebagai pencapaian suatu kegiatan, program, atau kebijaksanaan dalam mewujudkan tujuan, tujuan, misi, dan visi organisasi melalui pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurut Undang-Undang No.33 tahun 2004 pasal 66 ayat 1, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,

ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat masyarakat.”

Menurut Sardjiarto (2000), mengukur efisiensi dengan membandingkan usaha dengan output dapat memberikan informasi tentang sejauh mana hasil yang didapatkan sehubungan dengan penggunaan sejumlah sumber daya.

Salah satu ciri dari good governance atau pengelolaan pemerintahan yang baik adalah pertanggungjawaban. Pemikiran ini berasal dari keyakinan bahwa pengelolaan administrasi publik adalah kunci untuk mencapai pemerintahan yang bersih (Akbar dan Nurbaya, 2000). melalui laporan keuangan untuk melaporkan kinerja (Mahmudi, 2007).

Karena sistem penghargaan dan hukuman yang memperkuat pengukuran kinerja, sistem pengukuran kinerja dapat digunakan untuk mengendalikan organisasi. Menurut Schiff dan Lewin (1970), anggaran dirancang untuk berfungsi sebagai perencanaan dan sebagai standar kinerja. Dengan kata lain, anggaran digunakan sebagai sistem pengendalian untuk mengevaluasi kinerja manajemen. Selain peran anggaran, menurut Argyris (1952) dalam Titisari (2004), tujuan anggaran tercapai dan partisipasi bawahan penting untuk mencapai tujuan tersebut.

1. Ukuran Kinerja Menggunakan Rasio Keuangan

Warsidi dan Bambang dalam Fahmi (2014) menyatakan analisis rasio keuangan merupakan instrumen analisis prestasi yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan, yang ditujukan untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan. Sedangkan menurut

Munawir (2010), analisis rasio keuangan adalah analisis yang menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain, dan menggunakan alat analisa berupa rasio yang dapat menjelaskan atau memberikan gambaran kepada penganalisa tentang baik atau buruknya keadaan posisi keuangan terutama apabila angka rasio tersebut di bandingkan dengan angka rasio perbandingan yang digunakan sebagai standar. Rasio keuangan digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pada Instansi BLU. Hal ini dikarenakan setiap ukuran ini dapat digunakan untuk mengukur pola perkembangan posisi keuangan dan dapat digunakan untuk menafsirkan capaian efektivitas keputusan-keputusan strategis yang dibuat oleh BLU (Ahmad Fatoni, 2022).

1). Jenis Jenis Rasio Keuangan

Secara garis besar ada 4 jenis rasio yang dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan BLUD, yaitu *Rasio Likuiditas, Rasio Rentabilitas, periode penagihan utang, perputaran asset tetap, perputaran persediaan, dan rasio PNBPN terhadap biaya Operasional*

1. Rasio likuiditas :

Rasio Likuiditas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan suatu RSUD S. K. Lerik untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang harus segera dipenuhi pada saat yang tepat. Ada beberapa Rasio yang dipake antara lain:

1. Rasio kas/ cash ratio

Rasio ini membandingkan antara kas dan aktiva lancar yang bisa segera menjadi uang kas dengan hutang lancar.

$$\text{Rasio kas} = \frac{\text{kas dan setara kas}}{\text{Utang Lancar}} \times 100\%$$

2. Rasio lancar (*current ratio*)

Rasio ini adalah perbandingan antara aktiva lancar dengan kewajiban jangka panjang.

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

2. Rasio Rentabilitas:

Rentabilitas merupakan rasio untuk menghasilkan laba RSUD S. K. Lerik yang diukur dengan kesuksesan RSUD S. K. Lerik dalam kemampuannya menggunakan aktiva secara produktif. Rentabilitas ada beberapa jenis antara lain:

1. *Return on assets* (ROA)

Roa ini menunjukkan keuntungan dari kuantitas sumber daya yang digunakan di dalam organisasi. Hal ini merupakan bagian dari efektivitas pimpinan BLU dalam mengelola asset.

$$\text{ROA} = \frac{\text{Surplus (Defisit)}}{\text{Aset Tetap}} \times 100\%$$

2. *Return On Equity* (ROE)

Rasio ini menunjukan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini semakin baik, artinya posisi modal unit yang berfungsi BLUD semakin kuat.

Roe ini menunjukkan produktivitas pemanfaatan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini semakin baik, artinya posisi modal unit yang berfungsi BLUD semakin kuat .

$$\text{Return On Equity} = \frac{\text{Surplus (Defisit)}}{\text{Modal-Surplus (Defisit)}} \times 100\%$$

3. Periode Penagihan Piutang (*Collection Period*)

Collecting period Digunakan untuk melihat perbandingan antara piutang usaha dengan pendapatan usaha dalam satu tahun.

$$\text{PPP} = \frac{\text{Piutang Usaha} \times 360}{\text{pendapatan Usaha}} \times 1 \text{ Hari}\%$$

4. Perputaran Aset Tetap

Di gunakan untuk melihat perbandingan antara pendapatan operasional dengan aset tetap.

$$\text{PAT} = \frac{\text{Pendapatan Operasional}}{\text{Aset Tetap}} \times 100\%$$

5. Perputaran Persediaan

Di gunakan untuk melihat perbandingan antara jumlah total persediaan dengan pendapatan usaha.

$$\text{PAT} = \frac{\text{Total Persediaan} \times 365}{\text{Pendapatan BLUD}} \times 1 \text{ Hari}$$

6. Rasio PNBPN terhadap Biaya Operasional

Di gunakan untuk melihat perbandingan antara jumlah total persediaan dengan pendapatan usaha.

$$\text{PB} = \frac{\text{Pendapatan PNBPN}}{\text{Biaya Oerasional}} \times 100\%$$

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang mengambil judul analisis laporan keuangan sebagai dasar dalam menilai kinerja keuangan di RSUD S. K. Lerik.

Tabel 2.1.
Hasil Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Pongoh, Marsel.(2013)	“Analisis Laporan Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan PT. Bumi Resources Tbk.”	Kualitatif	“Berdasarkan rasio likuiditas secara keseluruhan keadaan perusahaan berada dalam keadaan baik, meski dalam kurun waktu dari tahun 2009-2011 berfluktuasi. Berdasarkan rasio solvabilitas keaaan perusahaan dalam posisisolvabel, karena modal perusahaan dalam keadaan cukup untuk menjamin hutang yang diberikan oleh kreditor, berdasarkan rasio profittabilitas secara keseluruhan perusahaan berada dalam posisi yang baik”
2.	Meutia Dewi (2017)	“Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan PT Smartfren Telecom, Tbk.”	kuantitatif	“Hasil analisis data menunjukkan bahwa tingkat likuiditas PT. Smartfren Telecom Tbk. rata-rata 77,72% pada tahun 2007-2016 dan tingkat solvabilitas rata-rata 79,96% pada tahun 2007-2016 menunjukkan kondisi yang kurang baik karena berada di bawah standar industri sebesar 200%.”
3.	Winarso (2018)	“Analisis kinerja keuangan terhadap laporan keuangan sesudah penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (ppk-blud) pada RSUD Idaman Kota Banjarbaru.”	Kuantitatif dan kualitatif	“Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan RSUD Idaman Banjarbaru mengalami fluktuasi, meskipun kinerjanya hampir sama dari tahun 2013 hingga 2016, dan menerima nilai 73,68% yang memenuhi kriteria Baik (A).”

4.	Iswayudi (2018)	“Analisis kinerja keuangan blu pada rumah sakit umum daerah Abdul Wahab Sjahranie Samarinda.”	Kualitatif dan kuantitatif	“Hasil analisis dan diskusi menunjukkan bahwa dari tahun 2012 hingga 2016 terjadi peningkatan dan penurunan rasio setiap tahunnya. Untuk rasio kas, rasio lancar, dan perputaran aset tetap, kenaikan rasio terjadi pada tahun 2012 hingga 2014, dan penurunan rasio terjadi pada tahun 2015 hingga 2016.”
5.	Candrasari, Mentari, Taufik Kurrohm an, and Nining Ika Wahyuni. (2018)	“Analisis kinerja keuangan dan pelayanan dengan kemandirian rumah sakit di RSUD Dr. Abdoer Rahem Situbondo”	Kuantitatif	“Hasil penelitian menunjukan bahwa kinerja keuangan yang diukur dengan rasio solvabilitas secara statistic terbukti berkolerasi kuat dengan <i>cost recoveryrate</i> dan tingkat kemandirian kinerja pelayanan yang diukur dengan BTO memiliki kolerasi kuat dengan tingkat kemandirian”
6.	Novia Larasati dan Imam Hidayat (2018)	“Analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan pada perusahaan sektor kesehatan (rumah sakit).”	Kuantitatif	“Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Mitra Keluarga Karyasehat Tbk memiliki kinerja keuangan yang cukup baik, sedangkan PT. Onix Capital Tbk memiliki kinerja keuangan yang lebih buruk. Rasio likuiditas meliputi rasio likuiditas saat ini dan cepat, rasio solvabilitas yang meliputi rasio hutang ke aset dan rasio hutang ke equity, rasio turnover aset tetap dan total, dan rasio profitabilitas yang meliputi rasi Hasilnya menunjukkan bahwa banyak bisnis memiliki kinerja keuangan yang buruk. Disarankan untuk menggunakan rata-rata industri untuk analisis dari hasil yang tidak memuaskan.”
7.	Arsa Nur Azhari Winarso (2018)	“Analisis Kinerja Keuangan Terhadap Laporan Keuangan Sesudah Penerapan Pola Pengelolaan	Kuantitatif	“Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan RSUD Idaman Banjarbaru memperoleh hasil yang fluktuatif meskipun cenderung hampir sama selama tahun 2013-2016,

		Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada RSUD Idaman Banjarbaru Kota Banjarbaru.”		dan nilai kinerja keuangan memperoleh kriteria Baik (A) dengan nilai 73,68%.”
8.	Mentari Candrari (2018)	“Analisis Kinerja Keuangan dan Pelayanan dengan Kemandirian Rumah Sakit di RSUD Dr.Abdoer Rahem Situbondo”	Kuantitatif dan kualitatif	“Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang diukur dengan rasio solvabilitas secara statistik terbukti berkorelasi kuat dengan cost recovery rate dan tingkat kemandirian.Kinerja pelayanan yang diukur dengan BTO memiliki korelasi kuat dengan tingkat kemandirian”
9	Nurliah, Nurliah, Abdul Rahman Mus, and Ibrahim Dani (2020)	“Analisis Kinerja Keuangan Pada Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit Umum”	Kuantitatif	“Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) hasil analisis rasio kas, rasio lancar, dan periode penagihan piutang di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar dari tahun 2015 hingga 2018 kurang baik; hasil analisis rasio keuangan rata-rata lebih rendah dari kisaran maksimum yang ditetapkan oleh Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-36/PB/2012; dan (2) hasil analisis perputaran aset tetap (PAT), imbalan atas aktiva tetap”
10.	Ahmad Fatoni (2023)	“Pengaruh Rasio Likuiditas, Rentabilitas dan Aktivitas terhadap Kinerja Keuangan di RS Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang”	Kuantitatif	“Hasil penelitian menunjukkan terdapatnya pengaruh yang signifikan Rasio Likuiditas terhadap kinerja keuangan, Rasio Rentabilitas terhadap kinerja keuangan, Rasio Aktivitas terhadap kinerja keuangan dan secara bersama / simultan ketiga rasio itu secara signifikan mempengaruhi kinerja keuangan.”

2.4 Kerangka Berpikir

Analisis laporan keuangan memberikan gambaran umum tentang kinerja organisasi, sehingga membantu pengambilan keputusan. Dengan menganalisis laporan keuangan, seharusnya dapat membuat keputusan yang bermanfaat bagi semua orang di dalam dan di luar organisasi.

RSUD S.K. Lerik adalah rumah sakit yang menjalankan sistem keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Dalam melakukan aktivitas pelayanannya, penting untuk mengukur kinerja, hal ini direncanakan untuk lebih mengembangkan kinerja rumah sakit, baik dari segi keuangan.

Gambar 2.1.
Kerangka Berpikir

